

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2019-2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan.

Dasar pembuatan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilakukan karena adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Selain itu, perubahan terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 juga dikarenakan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) ini berisi informasi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bertanggungjawab.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Samarinda, Januari 2022

Sekretaris Daerah,



Muhammad Sa'bani

Pembina Utama Madya

NIP. 19620128 198803 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	53
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	58
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	80
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	83
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	83
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	84
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah	87
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	91
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	91
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	93
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	96
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	98
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	153
BAB VIII PENUTUP	154
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Pendidikan	54
Tabel 2.2	Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Golongan	55
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Eselon	56
Tabel 2.4	Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Gender	57
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	59
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	63
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	83
Tabel 3.2	Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023	86
Tabel 3.3	Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	86
Tabel 3.4	Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020-2024	87
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah	94
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	97
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	99
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	153

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) disusun untuk mewujudkan Target Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Target Sasaran Pembangunan Nasional. RENSTRA PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RENSTRA PD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RENSTRA PD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, Sekretariat Daerah sebagai unsur Staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu, Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain.

RENSTRA adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan RENSTRA harus disinkronkan dengan dokumen RPJMD (visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan) Kepala Daerah.

Hubungan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RENSTRA PD disusun berpedoman pada RPJMD sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2. RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun.
3. RENSTRA PD adalah acuan sebagai penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
4. RENSTRA PD adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
5. RENSTRA PD adalah acuan sebagai penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah.
6. RENSTRA PD adalah acuan sebagai penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.
7. RENSTRA PD adalah acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Terkait dengan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan penjabaran dalam bentuk kegiatan dan rencana aksi secara konsisten yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Akibat adanya Perubahan RPJMD (P-RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, maka RENSTRA Perangkat Daerah juga harus dilakukan perubahan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renstra (P-RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 berpedoman pada Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. P-RENSTRA ini akan dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam P-RENSTRA tersebut yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang dibuat setiap tahun untuk mempermudah pelaksanaannya dan melakukan evaluasi capaiannya.

Dengan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan atau regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berdampak pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) sehingga RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga perlu dilakukan perubahan. Dokumen P-RENSTRA yang disusun oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai acuannya.

1.2. Landasan Hukum

- (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- (4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- (13) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
- (14) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
- (15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- (16) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis merupakan salah satu alat untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan, sehingga tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

P-RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan arahan kebijakan dan strategi untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2019-2023 pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diidentifikasi berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi yang kemudian dicari strategi penyelesaiannya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB 4 Tujuan dan Sasaran

BAB 5 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB 8 Penutup

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten yang masing-masing membawahi 3 (tiga) biro yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, dan hukum;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;

- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, dan hukum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha.

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;

- b. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pemerintahan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
- b. Subbagian Pemerintahan Umum; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Sub Bagian sebagaimana di maksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

- (1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah.
- (2) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pemerintahan umum.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Otonomi Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Otonomi Daerah, membawahi :

- a. Subbagian Administrasi Gubernur dan DPRD;
- b. Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah.

- (1) Subbagian Administrasi Gubernur dan DPRD mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan administrasi Gubernur dan DPRD.
- (2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan. Sub Bagian Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan kebijakan pengembangan wilayah.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerjasama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kerja Sama membawahi :

- a. Subbagian Kerja Sama antar Pemerintah;
- b. Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta; dan
- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama.

- (1) Subbagian Kerja Sama antar Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kerja sama antar Daerah.
- (2) Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan badan usaha/swasta maupun pihak ketiga.
- (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta.

1.2. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang agama dan kesehatan;

- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- a. Bagian Bina Mental Spiritual;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual serta kelembagaan bina spiritual.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijakan di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual; dan;

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan biro;

Bagian Bina Mental Spiritual, membawahkan :

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Subbagian Sarana dan Prasarana Spiritual; dan
- c. Subbagian Kelembagaan Bina Spiritual.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bina Mental Spiritual.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.
- (2) Subbagian Sarana dan Prasarana Spiritual mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana spiritual.
- (3) Subbagian Kelembagaan Bina Spiritual mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan bina spiritual.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, membawahi :

- a. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
- b. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan
- c. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.

- (1) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja.

- (3) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik, perpustakaan, arsip dan perhubungan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, membawahkan :

- a. Subbagian Kesehatan;
- b. Subbagian Sosial; dan
- c. Subbagian Pendidikan.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

- (1) Subbagian Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan.

- (2) Subbagian Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial.
- (3) Subbagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan.

1.3. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Hukum mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Hukum, membawahkan :

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota; dan
- c. Bagian Bantuan Hukum.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahkan :

- a. Subbagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
- b. Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi.

- (1) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyusunan produk hukum pengaturan.
- (2) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyusunan produk hukum penetapan.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dokumentasi dan naskah hukum lainnya.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II dan produk hukum Daerah wilayah III.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II dan produk hukum Daerah wilayah III; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahkan :

- a. Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
- b. Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
- c. Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah III.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota.

- (1) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan produk hukum Daerah wilayah I.
- (2) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan produk hukum Daerah wilayah II.
- (3) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan produk hukum Daerah wilayah III.

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;

- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Bantuan Hukum, membawahi :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Litigasi; dan
- c. Subbagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum.

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.
- b. Subbagian Litigasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan litigasi.
- c. Subbagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan non litigasi dan hak asasi manusia.

2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan administrasi pembangunan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan administrasi pembangunan;
- c. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, dan administrasi pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1. Biro Perekonomian

Biro Perekonomian mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumberdaya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Perekonomian, membawahi :

- a. Bagian Kebijakan Perekonomian;
- b. Bagian Sumber Daya Alam; dan
- c. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian.

Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas :

- (1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- (3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha; dan
- (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kebijakan Perekonomian, membawahkan :

- a. Subbagian Analisis Ekonomi Makro;
- b. Subbagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian.

- (1) Subbagian Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan analisis ekonomi makro.
- (2) Subbagian Analisis Ekonomi Mikro mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan analisis ekonomi mikro.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Sumber Daya Alam, membawahi :

- a. Sub Subbagian Sumber Daya Alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.
- b. Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
- c. Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam.

- (1) Sub Subbagian Sumber Daya Alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautanan dan perikanan.
- (2) Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pertambangan dan lingkungan hidup.
- (3) Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sumber daya alam energi dan air.

Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi, dan Badan Layanan Umum Daerah serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, mempunyai tugas :

- a. penyiapan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian BUMD dan BLUD, membawahi :

- a. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
- b. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan
- c. Subbagian Badan Layanan Umum Daerah.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

- (1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.
- (2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Air, Minum, Limbah dan Sanitasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi.

- (3) Subbagian Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan badan layanan umum Daerah.

2.2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pemantauan serta evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa, membawahkan :

- a. Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa.

- (1) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;

- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan :

- a. Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- b. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

- (1) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sistem pengadaan secara elektronik.
- (2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem informasi.
- (3) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan sumber daya manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, serta tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :

- a. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Pengadaan Barang dan Jasa;

- b. Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

- a. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan tata usaha.
- b. Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa.
- c. Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pendampingan, konsultasi atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

2.3. Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pembangunan, membawahi :

- a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
- c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahkan :

- a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah;
- b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara; dan
- c. Subagian Tata Usaha.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

- 1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah.
- 2) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara.
- 3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III.

Untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;

- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- 3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahkan :

- a. Subbagian Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
- b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
- c. Subbagian Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.

- (1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I.
- (2) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II.

- (3) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III.

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah;
- (3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah; dan

- (4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, membawahi :

- a. Subbagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
- b. Subbagian Pelaporan Pelaksanan Pembangunan Daerah; dan
- c. Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

- (1) Subbagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan analisis capaian kinerja pembangunan.
- (2) Subbagian Pelaporan Pelaksanan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanan pembangunan Daerah.
- (3) Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembangunan Daerah.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang, organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- e. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

3.1. Biro Organisasi

Biro Organisasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja tatalaksana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Organisasi mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
- (2) Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
- (3) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- (4) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana; dan
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Organisasi, membawahi :

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Bagian Tata Laksana.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- (3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi :

- a. Sub Subbagian Kelembagaan Provinsi;
- b. Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
- c. Subbagian Analisis Jabatan.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

- (1) Sub Subbagian Kelembagaan Provinsi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan provinsi.
- (2) Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan Perumusan Kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan kabupaten/kota.
- (3) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan analisis jabatan.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- (3) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- (4) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi :

- a. Subbagian Reformasi Birokrasi;
- b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Subbagian Budaya Kerja

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

- (1) Subbagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan reformasi birokrasi;
- (2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja; dan;
- (3) Subbagian Budaya Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan budaya kerja.

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik.

Bagian Tata Laksana mempunyai fungsi :

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- (2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- (3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;

- (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Laksana, membawahi :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Tata Laksana Pemerintahan; dan
- c. Subbagian Pelayanan Publik.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Laksana.

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.
- 2) Subbagian Tata Laksana Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata laksana pemerintahan.
- 3) Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik.

3.2. Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;

- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pimpinan, membawahi :

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- b. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan; dan
- c. Bagian Protokol.

Bagian sebagaimana masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, mempunyai fungsi :

- (1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian dan tata usaha;
- (2) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian dan tatausaha; dan
- (3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, membawahi :

- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

- 1) Subbagian perencanaan dan pelaporan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaporan.
- 2) Subbagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kepegawaian.
- 3) Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 138, Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :

- a. Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan;
- b. Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
- c. Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

Sub Bagian sebagaimana di maksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan.

- (1) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyiapan materi pimpinan.
- (2) Subbagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan komunikasi pimpinan.
- (3) Subbagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dokumentasi pimpinan.

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pemantauan dan evaluasi bidang acara, tamu dan hubungan keprotokolan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 142, Bagian Protokol, mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol, membawahi :

- a. Subbagian Acara;
- b. Subbagian Tamu; dan
- c. Subbagian Hubungan Keprotokolan.

Sub Bagian sebagaimana di maksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol.

- (1) Subbagian Acara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan acara.

- (2) Subbagian Tamu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporantamu.
- (3) Subbagian Hubungan Keprotokolan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan hubungan keprotokolan.

3.3. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Biro Umum mempunyai fungsi :

- (1) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tatausaha;
- (2) penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tata usaha; dan
- (3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Umum, membawahi :

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset;dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Bagian-bagian sebagaimana di maksud dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur dan urusan dalam.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Bagian Rumah Tangga fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan urusan dalam;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur dan urusan dalam; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Rumah Tangga, membawahi :

- a. Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
- b. Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
- c. Subbagian Urusan Dalam.

Sub Bagian sebagaimana di maksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Rumah Tangga.

- (1) Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan rumah tangga gubernur.
- (2) Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan rumah tangga wakil gubernur.
- (3) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan dalam.

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset Sekretariat Daerah, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset dan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi :

- a. Subbagian Kuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
- b. Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah; dan
- c. Subbagian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.

Sub Bagian sebagaimana di maksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset.

- (1) Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan verifikasi sekretariat Daerah.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan akuntansi dan penatausahaan aset sekretariat Daerah.
- (3) Subbagian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan

koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset sekretariat Daerah.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan, dan persuratan dan arsip;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Usaha, membawahi :

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
- b. Subbagian Pengelolaan Kendaraan; dan
- c. Subbagian Persuratan dan Arsip.

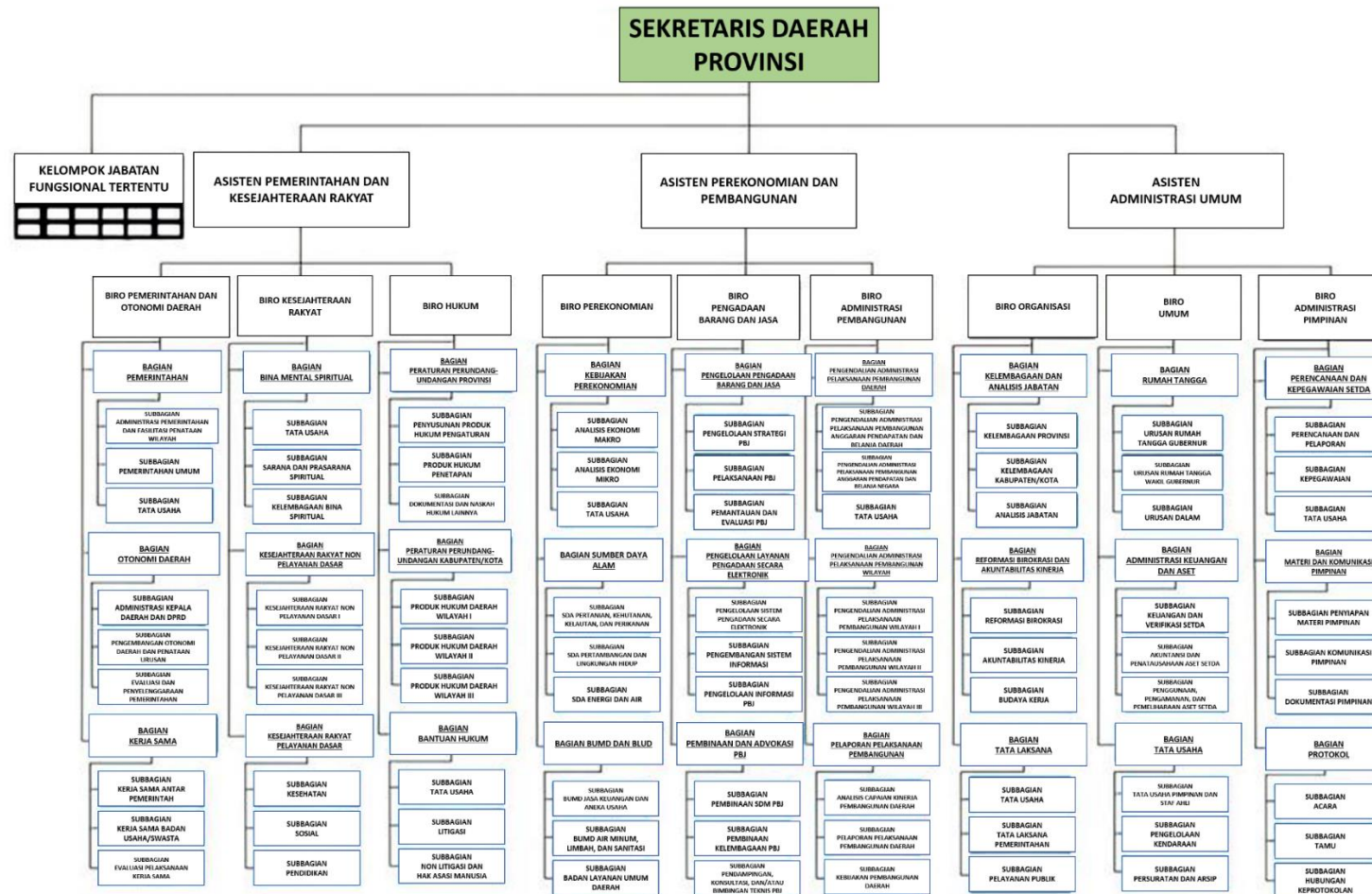
Sub Bagian sebagaimana di maksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf ahli mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha pimpinan dan staf ahli.
- (2) Subbagian Pengelolaan Kendaraan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kendaraan.

- (3) Subbagian Persuratan dan Arsip mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan persuratan dan arsip.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri.

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselonering:

1. Pendidikan

Sampai dengan 31 Desember 2021 sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 346 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD hingga S3. Berdasarkan rekapitulasi yang telah disusun, maka jumlah PNS dengan pendidikan S1 menduduki urutan pertama dengan jumlah 135 orang, urutan kedua adalah pendidikan SLTA sebanyak 106 orang, dan urutan ketiga adalah pendidikan S2 sebanyak 71 orang. Rekapitulasi jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan per 31 Desember 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Pendidikan

No.	Eksekutif/Biro	S.3	S.2	S.1	SM	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Asisten	-	3	-	-	-	-	-	3
3	Staf ahli	-	1	-	-	-	-	-	1
4	Tenaga Fungsional Utama	-	1	-	-	-	-	-	1
5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	6	15	-	8	1	-	30
6	Biro Hukum	-	7	11	1	2	-	-	21
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	5	11	-	5	-	-	21
8	Biro Perekonomian	-	9	11	1	3	-	-	24
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	10	8	1	6	-	-	25
10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	9	31	2	6	-	-	48
11	Biro Administrasi Pimpinan	-	9	15	1	13	-	-	38
12	Biro Umum	-	3	22	10	57	7	9	108
13	Biro Organisasi	-	7	11	1	6	-	-	25
Jumlah		-	71	135	17	106	8	9	346
Keadaan Per 31 Desember 2021									
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kepegawaian)									

2. Golongan, Eselon dan Jenis Kelamin

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara terus-menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya, baik dari pendidikan maupun kepangkatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan. Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Per 31 Desember 2021, PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki golongan III sebanyak 192 orang, diikuti oleh golongan II sebanyak 81 orang, golongan IV sebanyak 62 orang, dan golongan I sebanyak 11 orang.

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Golongan

No.	Eksekutif/Biro	GOL. IV	GOL. III	GOL. II	GOL. I	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	1
2	Asisten	3	-	-	-	3
3	Staf ahli	1	-	-	-	1
4	Tenaga Fungsional Utama	1	-	-	-	1
5	Biro Pemerintahan, dan Otonomi Daerah	5	21	3	1	30
6	Biro Hukum	6	12	3	-	21
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	5	14	2	-	21
8	Biro Perekonomian	9	13	2	-	24
9	Biro Administrasi Pembangunan	8	14	3	-	25
10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8	33	7	-	48
11	Biro Administrasi Pimpinan	6	23	9	-	38
12	Biro Umum	4	47	47	10	108
13	Biro Organisasi	5	15	5	-	25
Jumlah		62	192	81	11	346
Keadaan Per 31 Desember 2021						
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kepegawaian)						

Berdasarkan data per 1 Desember 2021, jumlah eselon sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 122 orang dengan berbagai tingkat eselon mulai dari Eselon I sampai dengan IV. Rekapitulasi jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan eselon per 31 Desember 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Eselon

No.	EKSEKUTIF/BIRO	Eselon I.B	Eselon II.A	Eselon II.B	Eselon III.A	Eselon IV.A	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	-	1
2	Asisten	-	3	-	-	-	3
3	Staf ahli	-	1	-	-	-	1
4	Tenaga Fungsional Utama	-	-	-	-	-	-
5	Biro Pemerintahan, dan Otonomi Daerah	-	-	1	3	9	13
6	Biro Hukum	-	-	1	3	9	13
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	1	3	9	13
8	Biro Perekonomian	-	-	1	3	9	13
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	1	3	9	13
10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	1	3	9	13
11	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	1	3	9	13
12	Biro Umum	-	-	1	3	9	13
13	Biro Organisasi	-	-	1	3	9	13
	Jumlah	1	4	9	27	81	122
Keadaan Per 31 Desember 2021							
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kepegawaian)							

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.4
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Gender

No.	EKSEKUTIF/BIRO	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Asisten	3	-	3
3	Staf ahli	1	-	1
4	Tenaga Fungsional Utama	-	1	1
5	Biro Pemerintahan, dan Otonomi Daerah	20	10	30
6	Biro Hukum	12	9	21
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	15	6	21
8	Biro Perekonomian	17	7	24
9	Biro Administrasi Pembangunan	14	11	25
10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	38	10	48
11	Biro Administrasi Pimpinan	26	12	38
12	Biro Umum	81	27	108
13	Biro Organisasi	16	9	25
Jumlah		244	102	346
Keadaan Per 31 Desember 2021				
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kepegawaian)				

3. Sarana dan Prasarana

Untuk menjamin terlaksananya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil inventarisasi data dari Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan 31 Desember 2021, adapun rekapitulasi barang ke neraca terdiri dari Aset Tetap dengan nilai aset sebesar Rp 253.578.670.274,00 dan Aset Lainnya dengan nilai aset sebesar Rp 13.337.981.542,68. Rincian sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019-2020 berdasarkan indikator yang terukur dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)				80%	80%				90%	90%				112.50	112.50			
	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu				1 Unit	1 Unit				2 Unit	2 Unit				200	200			
	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi				75%	75%				80%	50%				106.67	66.67			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD				70%	70%				35%	5%				50.00	7.14			
	Persentase Kerja Sama Yang Ditindaklanjuti				100%	100%				100%	90%				100	90			
	Persentase Penurunan Berita Negatif				5%	5%				0%	0%				0	0			
	Persentase pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Keprotokolan				90%	90%				90%	75%				100	83.33			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				12	12				12	12				100	100			
	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor				3	3				3	3				100	100			
	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah				15	15				15	15				100	100			
	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur				1	1				1	1				100	100			
	Dokumen perencanaan dan anggaran				3	3				3	3				100	100			
	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran				6	6				6	6				100	100			
	Jumlah Perda yang di tetapkan				10	10				9	4				90	40			
	Jumlah Hukum (Pergub/Kepgub) Provinsi Yang ditetapkan				650	650				644	723				99.08	111.23			
	Jumlah Produk Hukum yang di Publikasikan melalui website/JDIH				660	660				653	727				98.94	110.15			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Produk hukum Kab/Kota yang di Fasilitasi, Evaluasi dan Klarifikasi/ Pengkajian				300	300				311	320				103.67	106.67			
	Advice dan pertimbangan hukum Penyelesaian Sengketa yang diberikan kepada OPD/Masyarakat dengan cepat dan sesuai aturan yang berlaku				90	90				90	90				100	100			
	Pembinaan Kab/Kota Peduli HAM dan Sadar akan Hukum dan HAM				10	101				10	101				100	100			
	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Provinsi		Maturitas UKPBJ		3	3	3	3	PKP-PB Pro Aktif	3	3	3			100	100	100		
	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengendalian Pembangunan Daerah) Provinsi		Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu				70	75	80			78					100		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Provinsi		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0			0	0	0										
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	0.062			0.062	0.062	0.062										
			Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	0.92			0.92	0.92	0.92										

Sedangkan, realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019-2020 berdasarkan indikator program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Biro Administrasi Pimpinan																	
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	1,407,700,000	1,963,325,120				1,425,037,961	1,872,245,128				101.23	95.36				555,625,120.00	447,207,167.00
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	478,800,000	170,000,000				521,371,080	241,964,850				108.89	142.33				(308,800,000.00)	(279,406,230.00)
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	1,207,050,000	891,500,000				1,632,407,337	551,724,233				135.24	61.89				(315,550,000.00)	(1,080,683,104.00)
Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	60,000,000	18,500,000				31,194,000	3,135,500				51.99	16.95				(41,500,000.00)	(28,058,500.00)
Persentase Kerja Sama Yang Ditindaklanjuti	1,244,100,000	1,368,510,000				2,067,839,745	1,387,509,114				166.21	101.39				124,410,000.00	(680,330,631.00)
Persentase Penurunan Berita Negatif	9,821,620,000	9,229,280,800				11,422,939,311	9,926,567,311				116.30	107.56				(592,339,200.00)	(1,496,372,000.00)
Persentase pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Keprotokolan	1,525,742,000	1,678,316,200				1,849,196,674	868,355,986				121.20	51.74				152,574,200.00	(980,840,688.00)
Biro Hukum																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	520,400,000	540,315,197				453,616,500	530,341,422				87.17	98.15				19,915,197.00	76,724,922.00
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	520,400,000	540,315,197				453,616,500	530,341,422				87.17	98.15				19,915,197.00	76,724,922.00

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	255,400,000	29,761,048				227,583,000	10,860,000				89.11	36.49				(225,638,952.00)	(216,723,000.00)
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	243,400,000	1,700,000				218,047,000	0				89.58	0.00				(241,700,000.00)	(218,047,000.00)
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12,000,000	28,061,048				9,536,000	10,860,000				79.47	38.70				16,061,048.00	1,324,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,081,500,000	284,750,000				1,001,816,555	284,715,472				92.63	99.99				(796,750,000.00)	(717,101,083.00)
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,055,000,000	284,750,000				995,316,555	284,715,472				94.34	99.99				(770,250,000.00)	(710,601,083.00)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26,500,000	0				6,500,000	0				24.53	0.00				(26,500,000.00)	(6,500,000.00)
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	55,400,000	5,750,000				1,663,000	4,000,000				3.00	69.57				(49,650,000.00)	2,337,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	5,400,000	3,550,000				1,663,000	2,800,000				30.80	78.87				(1,850,000.00)	1,137,000.00
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	50,000,000	2,200,000				0	1,200,000				0	54.55				(47,800,000.00)	1,200,000.00

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	1,031,000,000	484,075,000				1,016,392,926	447,152,775				98.58	92.37				(546,925,000.00)	(569,240,151.00)
Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	1,031,000,000	484,075,000				1,016,392,926	447,152,775				98.58	92.37				(546,925,000.00)	(569,240,151.00)
Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	682,000,000	664,005,000				665,543,226	651,304,911				97.59	98.09				(17,995,000.00)	(14,238,315.00)
Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	682,000,000	664,005,000				665,543,226	651,304,911				97.59	98.09				(17,995,000.00)	(14,238,315.00)
Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	290,000,000	328,957,000				285,314,084	308,195,416				98.38	93.69				38,957,000.00	22,881,332.00
Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	290,000,000	328,957,000				285,314,084	308,195,416				98.38	93.69				38,957,000.00	22,881,332.00
Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	1,904,300,000	1,251,650,000				1,832,316,701	1,247,040,601				96.22	99.63				(652,650,000.00)	(585,276,100.00)
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	1,904,300,000	1,251,650,000				1,832,316,701	1,247,040,601				96.22	99.63				(652,650,000.00)	(585,276,100.00)
Program Pelayanan Bantuan Hukum	2,510,000,000	1,224,800,000				1,647,430,744	1,204,503,793				65.63	98.34				(1,285,200,000.00)	(442,926,951.00)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Palayanan Bantuan Hukum	2,150,000,000	922,700,000				1,312,177,679	915,695,478				61.03	99.24				(1,227,300,000.00)	(396,482,201.00)
Peningkatan Penyelesaian Sengketa	360,000,000	302,100,000				335,253,065	288,808,315				93.13	95.60				(57,900,000.00)	(46,444,750.00)
Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	555,000,000	471,250,000				523,968,957	388,793,400				94.41	82.50				(83,750,000.00)	(135,175,557.00)
Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	555,000,000	471,250,000				523,968,957	388,793,400				94.41	82.50				(83,750,000.00)	(135,175,557.00)
Biro Organisasi	10,456,792,000	7,214,900,575				8,884,111,697	5,614,160,414				84.96	77.81				(3,241,891,425.00)	(3,269,951,283.00)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	454,032,000	566,706,275				435,185,500	457,338,864				95.85	80.70				112,674,275.00	22,153,364.00
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	454,032,000	566,706,275				435,185,500	457,338,864				95.85	80.70				112,674,275.00	22,153,364.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	306,450,000	224,850,000				230,336,490	205,350,000				75.16	91.33				(81,600,000.00)	(24,986,490.00)
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	306,450,000	224,850,000				230,336,490	205,350,000				75.16	91.33				(81,600,000.00)	(24,986,490.00)
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	0	20,600,000				0	2,359,900				0.00	11.46				20,600,000.00	2,359,900.00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	964,785,000	1,475,000,000				857,858,720	850,814,450				88.92	57.68				510,215,000.00	(7,044,270.00)
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	816,785,000	1,420,000,000				763,359,020	850,814,450				93.46	59.92				603,215,000.00	87,455,430.00

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	148,000,000	55,000,000				94,499,700	0				63.85	0.00				(93,000,000.00)	(94,499,700.00)
Program Peningkatan Pelayanan Publik	906,920,000	576,052,300				847,923,559	520,865,100				93.49	90.42				(330,867,700.00)	(327,058,459.00)
Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	491,960,000	0				477,307,959	0				97.02	0.00				(491,960,000.00)	(477,307,959.00)
Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat	224,960,000	273,495,000				189,105,100	263,101,600				84.06	96.20				48,535,000.00	73,996,500.00
Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Publik	190,000,000	302,557,300				181,510,500	257,763,500				95.53	85.19				112,557,300.00	76,253,000.00
Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	127,960,000	203,100,000				119,603,800	146,772,300				93.47	72.27				75,140,000.00	27,168,500.00
Penataan Administrasi Kepegawaian Setda	127,960,000	203,100,000				119,603,800	146,772,300				93.47	72.27				75,140,000.00	27,168,500.00
Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	2,691,105,000	1,225,117,000				2,356,579,230	1,077,718,700				87.57	87.97				(1,465,988,000.00)	(1,278,860,530.00)
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2,526,995,000	1,068,880,000				2,254,718,450	929,183,600				89.23	86.93				(1,458,115,000.00)	(1,325,534,850.00)
Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	164,110,000	156,237,000				101,860,780	148,535,100				62.07	95.07				(7,873,000.00)	46,674,320.00
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	2,974,660,000	1,055,075,000				2,167,276,205	772,488,050				72.86	73.22				(1,919,585,000.00)	(1,394,788,155.00)
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	2,974,660,000	1,055,075,000				2,167,276,205	772,488,050				72.86	73.22				(1,919,585,000.00)	(1,394,788,155.00)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penguatan Kelembagaan	1,730,120,000	1,638,250,000				1,604,339,293	1,378,063,550				92.73	84.12				(91,870,000.00)	(226,275,743.00)
Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	599,960,000	768,545,000				545,575,443	716,461,550				90.94	93.22				168,585,000.00	170,886,107.00
Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	231,000,000	373,080,000				210,191,600	354,047,200				90.99	94.90				142,080,000.00	143,855,600.00
Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	899,160,000	496,625,000				848,572,250	307,554,800				94.37	61.93				(402,535,000.00)	(541,017,450.00)
Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	300,760,000	250,750,000				265,008,900	204,749,400				88.11	81.65				(50,010,000.00)	(60,259,500.00)
Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan	300,760,000	250,750,000				265,008,900	204,749,400				88.11	81.65				(50,010,000.00)	(60,259,500.00)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,205,300,000	910,592,383				1,137,716,750	894,723,420				9.44	9.83				(294,707,617.50)	(242,993,330.00)
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1,205,300,000	910,592,383				1,137,716,750	894,723,420				9.44	9.83				(294,707,617.50)	(242,993,330.00)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	241,400,000	48,400,000				222,064,000	24,200,000				9.20	5.00				(193,000,000.00)	(197,864,000.00)
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	216,400,000	33,900,000				199,869,000	12,800,000				9.24	3.78				(182,500,000.00)	(187,069,000.00)
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	25,000,000	14,500,000				22,195,000	11,400,000				8.88	7.86				(10,500,000.00)	(10,795,000.00)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	896,050,000	546,903,290				866,435,471	527,904,274				9.67	9.65				(349,146,710.00)	(338,531,197.00)
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	896,050,000	413,103,290				866,435,471	394,114,274				9.67	9.54				(482,946,710.00)	(472,321,197.00)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	133,800,000				0	133,790,000				0.00	10.00				133,800,000.00	133,790,000.00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	3,000,000	4,650,000				2,346,000	3,370,000				7.82	7.25				1,650,000.00	1,024,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	2,000,000	3,600,000				1,818,000	3,020,000				9.09	8.39				1,600,000.00	1,202,000.00
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	1,000,000	1,050,000				528,000	350,000				5.28	3.33				50,000.00	(178,000.00)
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	629,000,000	351,650,000				528,000	350,000				0.01	0.01				(277,350,000.00)	(178,000.00)
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pej. Negara, PAW Anggota DPRD Prov. Dan Kab/Kota	629,000,000	351,650,000				621,173,520	351,117,100				9.88	9.98				(277,350,000.00)	(270,056,420.00)
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1,402,500,000	507,550,000				1,381,133,204	506,732,773				9.85	9.98				(894,950,000.00)	(874,400,431.00)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah	348,250,000	98,200,000				346,938,510	97,785,200				9.96	9.96				(250,050,000.00)	(249,153,310.00)
Pembakuan nama rupabumi	336,650,000	121,300,000				332,146,450	120,920,615				9.87	9.97				(215,350,000.00)	(211,225,835.00)
Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	717,600,000	288,050,000				702,048,244	288,026,958				9.78	10.00				(429,550,000.00)	(414,021,286.00)
Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	1,264,250,000	3,077,475,000				1,254,619,702	2,960,175,215				9.92	9.62				1,813,225,000.00	1,705,555,513.00
Penataan Masalah Pertanahan	527,850,000	380,000,000				520,727,502	379,461,015				9.87	9.99				(147,850,000.00)	(141,266,487.00)
Pembinaan Kamtibmas	736,400,000	2,697,475,000				733,892,200	2,580,714,200				9.97	9.57				1,961,075,000.00	1,846,822,000.00
Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1,124,800,000	1,499,620,300				1,120,675,150	1,493,544,434				9.96	9.96				374,820,300.00	372,869,284.00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1,124,800,000	1,499,620,300				1,120,675,150	1,493,544,434				9.96	9.96				374,820,300.00	372,869,284.00
Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	681,700,000	591,671,250				681,263,017	585,566,456				9.99	9.90				(90,028,750.00)	(95,696,561.00)
Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	681,700,000	591,671,250				681,263,017	585,566,456				9.99	9.90				(90,028,750.00)	(95,696,561.00)
Biro Administrasi Pembangunan																	

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2,508,060,000	1,765,662,400				2,061,783,196	1,127,982,315				82.21	63.88				(742,397,600.00)	(933,800,881.00)
Layanan Pengadaan Barang/Jasa	768,300,000	281,100,000				638,033,969	46,674,660				83.04	16.60				(487,200,000.00)	(591,359,309.00)
Evaluasi dan Pembinaan SDM Pengadaan	695,295,000	356,750,000				544,215,886	241,271,817				78.27	67.63				(338,545,000.00)	(302,944,069.00)
Pengembangan dan Layanan Sistem Informasi Pengadaan	1,044,465,000	1,127,812,400				879,533,341	840,035,838				84.21	74.48				83,347,400.00	(39,497,503.00)
Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	2,283,808,000	1,783,812,500				1,641,374,446	1,463,241,185				71.87	82.03				(499,995,500.00)	(178,133,261.00)
Monitoring dan Evaluasi APBD	838,808,000	519,162,500				524,820,768	496,213,955				62.57	95.58				(319,645,500.00)	(28,606,813.00)
Monitoring dan Evaluasi Sektoral	841,500,000	851,200,000				631,391,988	737,602,660				75.03	86.65				9,700,000.00	106,210,672.00
Administrasi dan Evaluasi Pembangunan	603,500,000	413,450,000				485,161,690	229,424,570				80.39	55.49				(190,050,000.00)	(255,737,120.00)
Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program	3,742,593,000	2,599,316,640				3,408,690,403	2,274,506,657				91.08	87.50				(1,143,276,360.00)	(1,134,183,746.00)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan	364,710,000	17,721,640				296,304,425	17,721,640				81.24	100.00				(346,988,360.00)	(278,582,785.00)
Perencanaan dan Pengendalian Program	2,771,483,000	2,040,175,000				2,653,250,224	1,789,715,251				95.73	87.72				(731,308,000.00)	(863,534,973.00)
Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan	606,400,000	541,420,000				459,135,754	467,069,766				75.71	86.27				(64,980,000.00)	7,934,012.00

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Biro Pengadaan Barang dan Jasa																	
Registrasi akun penyedia dan Non Penyedia				790,040,400.00	700,040,400.00				790,040,400.00	700,040,400.00							
Biro Umum																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	24,758,720,000	24,758,720,000				19,899,147,891	16,486,138,066				80.37	66.59				0.00	(3,413,009,825.00)
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	24,758,720,000	20,572,409,373				19,899,147,891	16,486,138,066				80.37	80.14				(4,186,310,627.50)	(3,413,009,825.00)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	50,664,225,000	50,664,225,000				52,677,440,445	46,405,463,163				103.97	91.59				0.00	(6,271,977,282.00)
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana & Prasarana	40,022,810,000	28,609,475,000				31,466,184,712	27,485,606,865				78.62	96.07				(11,413,335,000.00)	(3,980,577,847.00)
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	27,248,770,000	21,982,978,000				21,211,255,733	18,919,856,298				77.84	86.07				(5,265,792,000.00)	(2,291,399,435.00)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	30,596,390,100	30,596,390,100				29,296,864,680	13,816,956,667				95.75	45.16				0.00	(15,479,908,013.00)
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	29,829,240,500	16,916,829,030				28,495,459,484	13,332,004,470				95.53	78.81				(12,912,411,470.00)	(15,163,455,014.00)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	934,478,000	692,942,210				801,405,196	484,952,197				85.76	69.98				(241,535,790.00)	(316,452,999.00)
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	185,850,000	185,850,000				724,945,300	34,697,000				390.07	18.67				0.00	(690,248,300.00)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	80,000,000	55,425,000				48,436,300	14,852,000				60.55	26.80				(24,575,000.00)	(33,584,300.00)
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	690,575,000	45,000,000				676,509,000	19,845,000				97.96	44.10				(645,575,000.00)	(656,664,000.00)
Program Pelayanan Tata Usaha Umum	4,822,484,900	4,822,484,900				1,769,504,785	1,673,826,193				36.69	34.71				0.00	(95,678,592.00)
Pelayanan Administrasi Biro	1,100,686,000	472,321,400				986,417,399	116,602,720				89.62	24.69				(628,364,600.00)	(869,814,679.00)
Pengelolaan Arsip dan Dokumen Setda	593,215,000	333,520,000				492,545,900	234,480,400				83.03	70.30				(259,695,000.00)	(258,065,500.00)
Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	387,300,000	530,751,000				290,541,486	407,324,500				75.02	76.74				143,451,000.00	116,783,014.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	0	870,054,600				0	674,898,900				0.00	77.57				870,054,600.00	674,898,900.00
Pelayanan Verifikasi dan Pelaporan Setda	0	301,384,700				0	240,519,673				0.00	79.80				301,384,700.00	240,519,673.00
Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda	8,852,500,000	8,852,500,000				4,516,178,598	4,183,564,056				51.02	47.26				0.00	(332,614,542.00)
Pengelolaan Barang Aset Setda	610,025,000	777,500,000				296,909,870	691,526,700				48.67	88.94				167,475,000.00	394,616,830.00
Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	5,120,451,500	5,405,960,217				4,219,268,728	3,492,037,356				82.40	64.60				285,508,717.00	(727,231,372.00)
Biro Perekonomian	4,750,000,000	2,422,190,070				4,447,441,513	1,898,694,411				93.63	78.39				(2,327,809,930.00)	(2,548,747,102.50)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	468,200,000	618,590,070				463,039,500	606,689,499				98.90	98.08				150,390,070.00	143,649,999.00
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	468,200,000	618,590,070				463,039,500	606,689,499				98.90	98.08				150,390,070.00	143,649,999.00

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	213,305,000	18,307,000				203,243,870	17,777,000				95.28	97.10				(194,998,000.00)	(185,466,870.00)
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	164,900,000	2,500,000				160,102,340	2,500,000				97.09	100.00				(162,400,000.00)	(157,602,340.00)
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	48,405,000	15,807,000				43,141,530	15,277,000				89.13	96.65				(32,598,000.00)	(27,864,530.00)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	879,000,000	466,893,000				865,216,376	390,549,219				98.43	83.65				(412,107,000.00)	(474,667,157.00)
Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah	879,000,000	466,893,000				865,216,376	390,549,219				98.43	83.65				(412,107,000.00)	(474,667,157.00)
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	61,195,000	0				0	0				0.00	0.00				(61,195,000.00)	-
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	61,195,000	0				0	0				0.00	0.00				(61,195,000.00)	-
Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	768,000,000	381,000,000				720,438,698	360,535,915				93.81	94.63				(387,000,000.00)	(359,902,783.00)
Koordinasi Kebijakan Ekonomi Pertanian	320,500,000	142,250,000				296,322,107	135,427,450				92.46	95.20				(178,250,000.00)	(160,894,657.00)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan	0	53,000,000				0	49,974,000				0.00	94.29				53,000,000.00	49,974,000.00
Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan	384,000,000	165,091,481				368,777,861	154,475,946				96.04	93.57				(218,908,519.00)	(214,301,915.00)
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan	63,500,000	20,658,519				55,338,730	20,658,519				87.15	100.00				(42,841,481.00)	(34,680,211.00)
Program kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	1,449,300,000	491,650,000				1,290,039,526	391,057,201				89.01	79.54				(957,650,000.00)	(898,982,325.00)
Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Daerah	571,000,000	175,000,000				560,781,645	140,340,400				98.21	80.19				(396,000,000.00)	(420,441,245.00)
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BUMD	690,800,000	204,550,000				543,198,816	140,455,010				78.63	68.67				(486,250,000.00)	(402,743,806.00)
Koordinasi Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah	187,500,000	112,100,000				186,059,065	110,261,791				99.23	98.36				(75,400,000.00)	(75,797,274.00)
Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa	911,000,000	445,750,000				905,463,543	435,430,326				99.39	97.68				(465,250,000.00)	(470,033,217.00)
Peningkatan Sinergi Kebijakan Perekonomian Daerah	596,000,000	258,000,000				595,540,547	253,413,442				99.92	98.22				(338,000,000.00)	(342,127,105.00)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi kebijakan Peningkatan Pariwisata dan Perhotelan	185,000,000	94,000,000				183,729,733	89,947,084				99.31	95.69				(91,000,000.00)	(93,782,649.00)
Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Bidang Koperasi dan UKM	130,000,000	93,750,000				126,193,263	92,069,800				97.07	98.21				(36,250,000.00)	(34,123,463.00)
Biro Kesejahteraan Rakyat																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	679,650,000	829,454,825				602,330,225	735,951,818				88.62	88.73				149,804,825	133,621,593
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	679,650,000	829,454,825				602,330,225	735,951,818				88.62	88.73				149,804,825	133,621,593
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	454,880,000	775,900,000				408,979,232	530,279,367				89.91	68.34				321,020,000	121,300,135
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	380,580,000	483,000,000				352,108,220	454,182,000				92.52	94.03				102,420,000	102,073,780
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	74,300,000	292,900,000				56,871,012	76,097,367				76.54	25.98				218,600,000	19,226,355
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	916,000,000	512,500,000				757,596,811	477,933,680				82.71	93.26				(403,500,000)	(279,663,131)
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	818,500,000	512,500,000				721,596,811	477,933,680				88.16	93.26				(306,000,000)	(243,663,131)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97,500,000	-				36,000,000	-				36.92	0.00				(97,500,000)	(36,000,000)
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	104,000,000	52,210,000				13,356,700	13,744,650				12.84	26.33				(51,790,000)	387,950
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	24,000,000	12,760,000				1,523,500	7,744,650				6.35	60.69				(11,240,000)	6,221,150
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	80,000,000	39,450,000				11,833,200	6,000,000				14.79	15.21				(40,550,000)	(5,833,200)
Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan	2,476,000,000	1,961,000,000				2,077,134,583	1,013,042,303				83.89	51.66				(515,000,000)	(1,064,092,280)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan	1,824,500,000	1,549,000,000				1,455,841,402	820,515,523				79.79	52.97				(275,500,000)	(635,325,879)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	651,500,000	412,000,000				621,293,181	192,526,780				95.36	46.73				(239,500,000)	(428,766,401)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1,395,000,000	1,001,000,000				1,281,837,594	864,648,260				91.89	86.38				(394,000,000)	(417,189,334)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	950,500,000	644,200,000				875,735,574	545,891,160				92.13	84.74				(306,300,000)	(329,844,414)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga	240,000,000	204,300,000				222,538,240	168,647,800				92.72	82.55				(35,700,000)	(53,890,440)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipaan	204,500,000	152,500,000				183,563,780	150,109,300				89.76	98.43				(52,000,000)	(33,454,480)
Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,279,250,000	956,725,400				1,030,245,150	672,749,300				80.54	70.32				(322,524,600)	(357,495,850)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	599,250,000	344,510,600				537,465,650	304,684,900				89.69	88.44				(254,739,400)	(232,780,750)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	345,000,000	181,800,000				237,847,900	99,287,100				68.94	54.61				(163,200,000)	(138,560,800)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	335,000,000	430,414,800				254,931,600	268,777,300				76.10	62.45				95,414,800	13,845,700
Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	3,434,420,000	2,733,650,000				2,722,402,370	2,485,768,300				79.27	90.93				(700,770,000)	(236,634,070)
Pelayanan Administrasi Hibah dan Bantuan Sosial	3,152,220,000	2,586,200,000				2,579,601,001	2,427,568,300				81.83	93.87				(566,020,000)	(152,032,701)
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	174,800,000	104,450,000				140,251,369	18,200,000				80.24	17.42				(70,350,000)	(122,051,369)
Penyusunan Perumusan Kebijakan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	107,400,000	43,000,000				2,550,000	40,000,000				2.37	93.02				(64,400,000)	37,450,000

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam analisis SWOT, tantangan (*Threat*) didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi merugikan organisasi. Sedangkan, peluang (*Opportunity*) didefinisikan sebagai faktor-faktor eksternal yang menguntungkan organisasi yang apabila dimanfaatkan dapat memberikan keunggulan kompetitif.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari sembilan biro. Masing-masing biro memiliki tugas pokok yang berbeda-beda sebagai berikut:

1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama.

2) Biro Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas pokok menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

3) Biro Hukum

Mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

4) Biro Perekonomian

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumberdaya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

5) Biro Administrasi Pembangunan

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

6) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

7) Biro Organisasi

mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja tatalaksana.

8) Biro Administrasi Pimpinan

Mempunyai tugas pokok penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

9) Biro Umum

Mempunyai tugas pokok pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Secara umum tantangan yang harus dihadapi oleh masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sumber daya manusia yang kurang memadai;
2. Sarana dan prasarana kurang memadai;
3. Peraturan yang tumpang tindih;
4. Kurangnya pemahaman dalam menyusun perencanaan kegiatan;
5. Dalam lingkup birokrasi tantangannya adalah:
 - a. Peningkatan kualitas birokrasi;
 - b. Reformasi birokrasi;
 - c. Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Sinkronisasi dan integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - e. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

6. Dalam lingkup pelelangan tantangannya adalah:

- a. Dokumen perencanaan tidak tepat waktu;
- b. Proses pelelangan tidak tepat waktu;
- c. Fluktuasi harga.

Sementara itu kondisi yang dianggap dapat memberikan peluang untuk melaksanakan fungsi atau pengembangan pelayanan adalah:

1. Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dengan membangun Sistem Informasi;
2. Memperkuat pola koordinasi lintas instansi;
3. Sinkronisasi aturan dari Undang-undang sampai dengan Peraturan Menteri yang dilakukan di tingkat pusat;
4. Pelaksanaan otonomi daerah;
5. Diklat peningkatan kualitas sumber daya manusia;
6. Peluang untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih cukup terbuka;
7. Penerapan *Center of Excellent* (COE) atau disebut juga Pusat Layanan Unggul dalam pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna layanan;
8. Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perlunya peningkatan Fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi dalam Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah - Belum optimalnya penetapan batas wilayah - Belum optimalnya penyediaan lahan untuk kepentingan umum - Belum sinkronnya data dasar Standar Pelayanan Minimum (SPM) - Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat di Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota - Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah - Belum optimalnya penerapan kebijakan di bidang perekonomian	- Masih ada perbedaan persepsi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 - Kurangnya komitmen antar kab/kota terhadap batas wilayah - Rendahnya pemahaman masyarakat dan instansi terhadap proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum - Kurang tervalidasinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dari Perangkat Daerah yang menerapkan pelayanan dasar - Belum maksimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat di Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota - Belum tersedianya data dan informasi yang terpadu di bidang kesejahteraan rakyat dengan baik. - Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya. - Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam menelaah Produk Hukum. - Belum terbangunnya sinergitas antar Perangkat Daerah terkait (<i>stakeholder</i>), dunia usaha dan masyarakat

No	Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Belum tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa - Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan - Belum optimalnya penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran - Belum Optimalnya Kontrol atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas - Belum optimalnya kualitas pelayanan keprotokolan - Belum optimalnya pemberitaan positif pada media massa	- Belum diterapkannya kebijakan pengadaan barang dan jasa - Belum di terapkannya prinsip pengadaan barang dan jasa - Belum ditaatinya kode etik pengadaan barang dan jasa - Belum optimalnya monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja - Rendahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara terkait Perencanaan - Rendahnya kualitas data dan informasi terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah - Pemahaman Perangkat Daerah terkait Urusan masih kurang - Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) disusun belum sesuai dengan kebutuhan Organisasi - Belum Optimalnya Penerapan SAKIP, khususnya Penerapan <i>Cascading</i> dan Rencana Aksi pada Perangkat Daerah - Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum optimal - Belum optimalnya standar pelayanan pengaturan jadwal kegiatan Pemerintah Daerah. - Belum optimalnya kerjasama dengan media massa

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Visi tersebut didukung oleh berbagai misi berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, rencana pembangunan kedepan tidak hanya dititik beratkan pada pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan tetapi lebih kepada sumber daya alam terbarukan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan keseimbangan tersebut melalui model pembangunan ekonomi hijau dengan dimensi-dimensi penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata (inklusif), ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

A. Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur, selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur kedepan ditetapkan Visi P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Tabel 3.2
Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Visi RPJPD 2005-2025	Visi RPJMN 2015-2019	Visi P-RPJMD 2019-2023
Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat , Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong	Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Berikut adalah penjelasan visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023:

Tabel 3.3
Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat	Berani	Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat
	Berdaulat	Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
		Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing

B. Misi Daerah

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Guna mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Sasaran Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020-2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.				
	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.				
	1) Indeks Demokrasi Indonesia.	72,39 (IDI 2018)	77,36	78,66	Ditjen Polpum
	2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Ditjen Polpum
	3) Indeks Kinerja Ormas.	N/A	-*	Nilai 70	Ditjen Polpum
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.				
	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,01 (2018)	67,1	67,5	Ditjen Polpum
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
	4) Indeks	Nilai	Nilai	Nilai	Ditjen

	Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	2,305	2,310	2,330	Polpum
c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.					
	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-*	64	Ditjen Polpum
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.					
	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	N/A	-*	150 daerah	Ditjen Bina Adwil
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.				
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.				
	1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	N/A	15%	80%	BPSDM
	2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	4) Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni.	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,60	IPDN
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.				
	1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda

	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.				
	1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	2) Nilai Evaluasi Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	Nilai	Nilai	Nilai 3,2 (Sangat Sinkron)	Ditjen Bina Bangda
	5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	10%	75%	Ditjen Bina Pemdes
	6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Ditjen Bina Keuda
	7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	N/A	-*	36%	Badan Litbang
	8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".	N/A	55 Daerah	165 Daerah	Badan Litbang
	9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	10) Indeks Kapasitas Inspektorat	N/A	-*	Nilai 90 (A)	Itjen

3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	Nilai 75,43	Nilai 85,01	Nilai 93,01	Setjen
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas				
	1) Indeks Pengawasan Internal.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri				
	1) Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	N/A	40%	65%	Badan Litbang

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tidak ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, namun ada beberapa indikator sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan ketugasan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Persentase kelembagaan organisasi Perangkat Daerah yang ideal;
2. Akuntabilitas kinerja;
3. Indeks reformasi birokrasi Kemendagri.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pelayanan pada Sekretariat Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya informasi dan laporan kegiatan setiap Bagian di Perangkat Daerah;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan;

4. Belum optimalnya tingkat koordinasi dan konsultasi, baik antara instansi terkait maupun kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat;
5. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan;
6. Kurangnya pemahaman tentang perlunya penataan aset di Perangkat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, setiap Perangkat Daerah dalam kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya harus memperhatikan faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini agar manfaat dan hasil dari pelaksanaan pembangunan dapat dirasakan dan pelayanan kepada masyarakat tidak menjadi sia-sia dan tidak merusak lingkungan.

Bila dilihat dari tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat hubungan cukup signifikan dengan RTRW dan KLHS secara langsung. Namun dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, maka analisis RTRW dan KLHS perlu diperhatikan agar hasil-hasil rumusan kebijakan Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS serta berujung pada dukungan terhadap percepatan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan

misinya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dibagi menjadi 3 (tiga) isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan
 - Belum optimalnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - Belum optimalnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan
3. Isu terkait pelayanan publik yang prima
 - Belum optimalnya peningkatan kualitas kebijakan pelayanan publik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond*, dan *continously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam P-RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran P-RENSTRA Sekretariat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien		Nilai Akuntabilitas Kinerja	76.55	76.60	76.65	77.00	78.00
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3.07	3.08	3.10	3.10	3.15
			Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	85.00	90.00	90.00	92.50	95.00
			Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi			100.00	100.00	100.00
			Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	80.00	85.00	85.00	87.00	90.00
		Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti			90	95	100
			Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	0	0	70	75	80
			Indeks tata kelola pengadaan			70 (cukup)	75 (baik)	80 (baik)
		Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	70	75	77	79	81
			Indeks Kelembagaan		65.64 (peringkat 4)	66 (peringkat 4)	67 (peringkat 4)	69 (peringkat 4)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	81.50	82.00	82.30	82.50	83.00
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	76.61 (B/Baik)	77.00 (B/Baik)	77.10 (B/Baik)	77.50 (B/Baik)	77.80 (B/Baik)
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	76.90	77.05	77.20	77.35	77.50
			Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	67	68	69	70	71

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang,
2. Didasarkan pada capaian kinerja pembangunan,
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan
4. Terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan

menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi: Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat			
Misi 5: Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik
			Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
			Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman
	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur
			Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Sekretariat Daerah ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran serta program yang mendukung secara tidak langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penataan Organisasi, serta Program Perekonomian dan Pembangunan. Program yang mendukung secara tidak langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Administrasi Umum.

Perhitungan pagu anggaran program pada tahun keempat P-RENSTRA Sekretariat Daerah dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program pada tahun kelima diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran akan naik sebesar 10% dari tahun sebelumnya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpim								84%	10.747.466.970	85%	16.245.166.230	85%	16.245.166.230	Biro Adpim	Kaltim
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100%	616.358.000		616.358.000			Biro Adpim	Kaltim
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah								2 Dokumen	609.850.000		609.850.000			Biro Adpim	Kaltim
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja lingkup Setda								4 Dokumen	6.508.000		6.508.000			Biro Adpim	Kaltim
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya keuangan perangkat daerah dengan baik								100%	342.548.288		342.548.288			Biro Adpim	Kaltim
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan ASN								12 Dokumen	342.548.288		342.548.288			Biro Adpim	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya administrasi kepegawaian pada perangkat daerah							100%	488.404.250		488.404.250			Biro Adpim	Kaltim	
			Pendidikan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan							4 Doku men	110.500.000		110.500.000			Biro Adpim	Kaltim	
			pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Setda							2 Doku men	377.904.250		377.904.250			Biro Adpim	Kaltim	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya penunjang administrasi umum perangkat daerah							100%	1.432.591.384		1.536.669.159			Biro Adpim	Kaltim	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan alat tulis kantor							12 Laporan	25.944.589		25.944.589			Biro Adpim	Kaltim	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan							12 Laporan	15.000.000		15.000.000			Biro Adpim	Kaltim	
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi							160 O/T	1.249.557.795		1.353.635.570			Biro Adpim	Kaltim	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah porsi makanan yang diadakan							1000 porsi	142.089.000		142.089.000			Biro Adpim	Kaltim	
			Pengadaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah							100%	185.292.900		185.292.900			Biro Adpim	Kaltim	
			Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor							5 Jenis	185.292.900		185.292.900			Biro Adpim	Kaltim	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100%	149.064.996		149.064.996			Biro Adpim	Kaltim	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional							15 Unit	49.464.996		49.464.996			Biro Adpim	Kaltim	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya							12 Laporan	99.600.000		99.600.000			Biro Adpim	Kaltim	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan							100%	8.911.407.680		9.011.407.680			Biro Adpim	Kaltim	
			Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Naskah Pidato dan Presentasi							12 Dokumen	496.858.310		496.858.310			Biro Adpim	Kaltim	
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen yang terpublikasi							12 Dokumen	7.882.989.370		7.932.989.370			Biro Adpim	Kaltim	
			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi							12 Dokumen	531.560.000		581.560.000			Biro Adpim	Kaltim	
			Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah							100%	2.391.937.025		2.391.937.025			Biro Adpim	Kaltim	
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda							4 Dokumen	966.591.615		966.591.615			Biro Adpim	Kaltim	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen kunjungan Tamu yang terlayani							2 Dokumen	900.405.410		900.405.410			Biro Adpim	Kaltim	
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah dokumen administrasi keprotokolan							2 Dokumen	524.940.000		524.940.000			Biro Adpim	Kaltim	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%	1.523.483.932		1.523.483.932			Biro Adpim	Kaltim	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi,Listrik,dan Sumber Daya Air yang terbayarkan							12 Dokumen	24.707.100		24.707.100			Biro Adpim	Kaltim	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis							12 Laporan	1.498.776.832		1.498.776.832			Biro Adpim	Kaltim	
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Hukum							83%	1.633.544.558	84%	1.505.069.649			Biro Hukum		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan							100	4.410.000	100	4.410.000			Biro Hukum		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran							2	4.410.000	2	4.410.000			Biro Hukum		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik							100	103.920.000	100	103.920.000			Biro Hukum		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan dokumen penatausahaan administrasi keuangan							12	103.920.000	12	103.920.000			Biro Hukum		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah							100	7.680.000	100	7.680.000			Biro Hukum		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD							12	7.680.000	12	7.680.000			Biro Hukum		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah							100	72.000.000	100	72.000.000			Biro Hukum		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat							3	72.000.000	3	72.000.000			Biro Hukum		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah							100	83.279.000	100	83.279.000			Biro Hukum		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan							12	83.279.000	12	83.279.000			Biro Hukum		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan								2	20.060.200	2	20.060.200			Biro Hukum	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan								12	60.952.000	12	60.952.000			Biro Hukum	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggara n koordinasi dan konsultasi								45	318.600.156	45	371.377.005			Biro Hukum	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100	5.000.000	100	5.000.000			Biro Hukum	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan								500	5.000.000	500	5.000.000			Biro Hukum	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis								12	453.762.944	12	453.762.944			Biro Hukum	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100	24.750.000	100	24.750.000			Biro Hukum	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor yang dipelihara								25	24.750.000	25	24.750.000			Biro Hukum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100	297.878.500	100	169.255.505			Biro Hukum		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor							1	297.878.500	1	169.255.505			Biro Hukum		
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM							100%	4.366.455.442	100%	4.494.500.000			Biro Hukum		
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota							100	1.906.824.200	100	2.850.000.000			Biro Hukum		
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diharmonisasi							80	641.824.000	80	900.000.000			Biro Hukum		
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan							600	201.705.000	600	400.000.000			Biro Hukum		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di Publikasikan							610	438.305.200	610	600.000.000			Biro Hukum		
			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi, Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota							350	624.990.000	350	950.000.000			Biro Hukum		
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Litigasi Kepada UnsurUnsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat							100	1.220.703.000	100	1.644.500.000			Biro Hukum		
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Perkara/Kasus							10	795.230.000	10	1.000.000.000			Biro Hukum		
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Kab/Kota yang diikutkan dalam penilaian kriteria Kab/Kota Peduli HAM							10	425.473.000	10	644.500.000			Biro Hukum		
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatkan Kualitas kebijakan pelayanan publik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Sekretariat Daerah							83%	2.205.341.944	83%	4.593.145.280	83%	4.593.145.280	Biro Organisasi	Prov. Kaltim	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan							100%	172.534.790	100%	633.393.590	100%	633.393.590	Biro Organisasi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan								12 Lapor an	172.534.790	12 Lapor an	216.990.310	12 Lapor an	216.990.310	Biro Organisasi	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan								100%	41.400.000	100%	41.400.000	100%	41.400.000	Biro Organisasi	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD								1 Lapor an	41.400.000	1 Lapor an	41.400.000	1 Lapor an	41.400.000	Biro Organisasi	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah								100%	109.410.000	100%	520.952.500	100%	520.952.500	Biro Organisasi	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek /Diklat								7 Orang	109.410.000	7 Orang	234.450.000	7 Orang	234.450.000	Biro Organisasi	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah								100%	1.372.708.050	100%	2.229.375.165	100%	2.229.375.165	Biro Organisasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							12 Lapor an	50.960.700	12 Lapor an	15.000.000	12 Lapor an	15.000.000	Biro Organisasi		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Yang Disediakan							1580 Porsi	294.970.000	1580 Porsi	300.000.000	1580 Porsi	300.000.000	Biro Organisasi		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan							12 Bulan	39.697.350	12 Bulan	49.700.585	12 Bulan	49.700.585	Biro Organisasi		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu							95 Orang	10.280.000	95 Orang	24.980.000	95 Orang	24.980.000	Biro Organisasi		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraa n koordinasi dan konsultasi							164 OT	976.800.000	164 OT	1.839.694.580	164 OT	1.839.694.580	Biro Organisasi		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100%	194.256.520	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Biro Organisasi		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							10 Unit	194.256.520	10 Unit	250.000.000	10 Unit	250.000.000	Biro Organisasi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100%	293.182.584	100%	889.327.125	100%	889.327.125	Biro Organisasi	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Surat Masuk dan Keluar								1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	Biro Organisasi	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis								12 Dokumen	288.182.584	12 Dokumen	416.403.280	12 Dokumen	416.403.280	Biro Organisasi	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik								100%	21.850.000	100%	28.696.900	100%	28.696.900	Biro Organisasi	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2								12 Unit	7.650.000	12 Unit	13.956.900	12 Unit	13.956.900	Biro Organisasi	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor								20 Unit	14.200.000	20 Unit	14.740.000	20 Unit	14.740.000	Biro Organisasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)							79%	1.855.181.293	81%	2.533.052.500	81%	2.533.052.500	Biro Organisasi		
				Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Prosedur Kriteria (NSPK)							95%	1.845.868.227	97%	2.520.336.500	97%	2.520.336.500	Biro Organisasi		
				Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)							79%	1.093.608.537	89%	1.493.206.000	89%	1.493.206.000	Biro Organisasi		
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)							95%	4.794.658.056	96%	6.252.325.000	96%	6.252.325.000	Biro Organisasi		
				Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan							100%	1.780.045.056	100%	2.291.215.000	100%	2.291.215.000	Biro Organisasi		
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya							37 PD	846.654.056	37 PD	1.007.824.000	37 PD	1.007.824.000	Biro Organisasi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi								37 PD		37 PD		37 PD		Biro Organisasi	
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya								10 Kab/Kota	492.791.000	10 Kab/Kota	492.791.000	10 Kab/Kota	492.791.000	Biro Organisasi	
				Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti								50%				60%		60%	Biro Organisasi
			Penataan Analisis Jabatan	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan								1 Dokumen	440.600.000	1 Dokumen	790.600.000	1 Dokumen	790.600.000	Biro Organisasi	
				Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Anjab dan ABK nya								10 Kab/Kota		10 Kab/Kota		10 Kab/Kota		Biro Organisasi	
				Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi								10 Kab/Kota		10 Kab/Kota		10 Kab/Kota		Biro Organisasi	
				Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Penyusunan								10 Kab/Kota		10 Kab/Kota		10 Kab/Kota		Biro Organisasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi					
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
				Formasi Pegawai								37 PD				37 PD			Biro Organisasi					
				Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja																				
				Laporan Evaluasi Jabatan							1 Doku men			1 Doku men				1 Doku men					Biro Organisasi	
				Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi							50%			50%				50%					Biro Organisasi	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan							100%	3.014.613.000	100%	3.961.110.000	100%	3.961.110.000		3.961.110.000	Biro Organisasi					
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Fasilitasi Evaluasi Reformasi Birokrasi							1 Doku men	1.006.753.000	1 Doku men	1.201.825.000	1 Doku men	1.201.825.000		1.201.825.000	Biro Organisasi					
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kab / Kota yg dilakukan Monitoring dan Pembinaan SAKIP							10 Kab/Kota	805.160.000	10 Kab/Kota	1.201.825.000	10 Kab/Kota	1.201.825.000		1.201.825.000	Biro Organisasi					
				Jumlah PD yang difasilitasi Evaluasi AKIP							1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men			1 Doku men		1 Doku men	Biro Organisasi			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Jumlah PD yang difasilitasi Penerapan / Penguatan SAKIP							1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men		Biro Organisasi		
				Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKJIP							1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men		Biro Organisasi		
				Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim							1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men		Biro Organisasi		
				Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur							1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men		Biro Organisasi		
			Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk Kelompok Budaya Kerja							37 PD	150.000.000	37 PD	150.000.000	37 PD	150.000.000	Biro Organisasi		
				Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan penerapan Budaya Kerja							37 PD		37 PD		37 PD		Biro Organisasi		
			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen peta Proses Bisnis							1 Doku men	301.850.000	1 Doku men	472.800.000	1 Doku men	472.800.000	Biro Organisasi		
				Laporan Fasilitasi Pakaian Dinas							1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men		Biro Organisasi		
				Laporan Fasilitasi Pakaian Dinas							1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men		Biro Organisasi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitasi dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat							1 Doku men	750.850.000	1 Doku men	884.660.000	1 Doku men	884.660.000	Biro Organisasi		
				Fasilitasi dan Evaluasi standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah						1 Doku men	1 Doku men		1 Doku men		Biro Organisasi				
				Fasilitasi Evaluasi Unit Pelayanan Publik						1 Doku men	1 Doku men		1 Doku men		Biro Organisasi				
				Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik						1 Doku men	1 Doku men		1 Doku men		Biro Organisasi				
				Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggara n Pelayanan Publik						1 Doku men	1 Doku men		1 Doku men		Biro Organisasi				
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kinerja penyelengara n pemerintah daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								82	1.778.719.095	82	1.996.594.528			Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	
			Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100	5.205.700	100	5.725.500			Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2 Dokumen	5.205.700	2 Dokumen	5.725.500			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									139.800.000		153.780.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							12 Laporan	139.800.000	12 Laporan	153.780.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									12.150.000		13.365.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							6 orang	12.150.000	6 orang	13.365.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah									856.553.500		942.208.850			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							12 Laporan	75.022.000	12 Laporan	82.524.200			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							12 Bulan	41.131.500	12 Bulan	45.244.650			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							90 OT	740.400.000	90 OT	814.440.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									181.531.900		199.685.090			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							12 Unit	181.531.900	12 Unit	199.685.090			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									512.268.995		603.500.188			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							350 Lembar	3.500.000	350 Lembar	3.850.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12 Dokumen	508.768.995	12 Dokumen	599.650.188			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									71.209.000		78.329.900			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya							9 Unit	9.000.000	9 Unit	9.900.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							12 Laporan	62.209.000	12 Laporan	68.429.900			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH										3.320.147.604		3.784.612.225			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan										1.182.028.800		1.100.000.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum								3 Laporan	747.229.200	3 Laporan	650.000.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
			Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah								4 Laporan	434.799.600	4 Laporan	450.000.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
			Pelaksanaan Otonomi Daerah										1.638.139.600		1.600.000.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD								3 Laporan	476.278.000	3 Laporan	450.000.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan								4 Laporan	656.261.600	4 Laporan	650.000.000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraa n Pemerintahan							3 Lapor an	505.600.000	3 Lapor an	500.000.000			Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah		
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah									499.979.204		1.084.612.225			Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah		
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi							1 Lapor an	323.579.204	1 Lapor an	484.612.225			Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah		
			Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi							1 Lapor an	97.800.000	1 Lapor an	250.000.000			Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah		
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi							1 Lapor an	78.600.000	1 Lapor an	350.000.000			Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah		
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian						82	1.894.529.061	83	1.875.000.000	84	1.906.955.884	84		Biro Perekonomian	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan					100%	11.500.000	100%	11.500.000	100%	54.853.000	100%		Biro Perekonomian		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran					4 dokumen	5.750.000	4 dokumen	5.750.000	4 dokumen	43.993.000	4 dokumen		Biro Perekonomian		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 laporan	5.750.000	4 laporan	5.750.000	4 laporan	10.860.000	4 laporan		Biro Perekonomian		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan					90%	171.013.000	92%	171.013.000	95%	119.250.000	95%		Biro Perekonomian		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	171.013.000	12 laporan	171.013.000	12 Dokumen	119.250.000	12 Dokumen		Biro Perekonomian		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan					100%	28.800.000	100%	28.800.000	100%	13.440.000	100%		Biro Perekonomian		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 laporan	28.800.000	1 laporan	28.800.000	1 laporan	13.440.000	1 laporan		Biro Perekonomian		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah					100%	-	100%	12.000.000	100%	24.139.884	100%		Biro Perekonomian		
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai					24 Dokumen	-	28 laporan	5.000.000	24 Dokumen	1.200.000	24 Dokumen		Biro Perekonomian		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					14 orang	-	14 orang	7.000.000	14 orang	22.939.884	14 orang		Biro Perekonomian		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah					100%	1.077.340.905	100%	963.058.384	100%	880.376.000	100%		Biro Perekonomian		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					10 paket	215.622.405	10 laporan	40.739.884	10 paket	47.080.000	10 paket		Biro Perekonomian		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					600 paket		600 porsi	14.400.000	600 paket	30.000.000	600 paket		Biro Perekonomian		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 paket	14.638.500	12 laporan	14.638.500	12 paket	18.016.000	12 paket		Biro Perekonomian		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	7.680.000	12 Laporan	7.680.000	12 Dokumen	7.680.000	12 Dokumen		Biro Perekonomian		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					120 Laporan	839.400.000	120 OT	885.600.000	120 Laporan	777.600.000	120 Laporan		Biro Perekonomian		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	547.198.856	100%	549.948.616	100%	635.549.680	100%		Biro Perekonomian		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					120 Laporan	1.200.000	120 lembar	1.200.000	120 Laporan	1.320.000	120 Laporan		Biro Perekonomian		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 dokumen	545.998.856	12 dokumen	548.748.616	12 dokumen	634.229.680	12 dokumen		Biro Perekonomian		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100%	-	100%	80.000.000	100%	125.332.320	100%		Biro Perekonomian		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 unit	-	1 Laporan	80.000.000	1 unit	125.332.320	1 unit		Biro Perekonomian		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik					100%	58.676.300	100%	58.680.000	100%	54.015.000	100%		Biro Perekonomian		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 unit	40.826.300	1 unit	40.830.000	1 unit	35.765.000	1 unit		Biro Perekonomian		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 unit	17.850.000	12 laporan	17.850.000	12 unit	18.250.000	12 unit		Biro Perekonomian		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian						90%	3.607.047.706	95%	2.625.000.000	100%	2.900.000.000	100%		Biro Perekonomian	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						1 dokumen	1.732.085.000	1 laporan	750.000.000	1 dokumen	725.000.000	1 dokumen		Biro Perekonomian	
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						2 dokumen	888.500.000	2 laporan	425.000.000	2 dokumen	362.500.000	2 dokumen		Biro Perekonomian	
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						1 dokumen	843.585.000	1 laporan	325.000.000	1 dokumen	362.500.000	1 dokumen		Biro Perekonomian	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						1 dokumen	1.129.962.706	1 laporan	950.000.000	1 dokumen	1.087.500.000	1 dokumen		Biro Perekonomian	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan						3 dokumen	588.150.000	3 laporan	450.000.000	3 dokumen	362.500.000	3 dokumen		Biro Perekonomian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						2 doku men	290.430.653	2 laporan	300.000.000	2 doku men	362.500.000	2 doku men		Biro Perekonomian	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						2 doku men	251.382.053	2 laporan	200.000.000	2 doku men	362.500.000	2 doku men		Biro Perekonomian	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						1 doku men	745.000.000	1 laporan	925.000.000	1 doku men	1.087.500.000	1 doku men		Biro Perekonomian	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						1 doku men	395.000.000	1 laporan	475.000.000	1 doku men	362.500.000	1 doku men		Biro Perekonomian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi					1 doku men	200.000.000	1 lapora n	250.000.000	1 doku men	362.500.000	1 doku men		Biro Perekonomian		
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah					1 doku men	150.000.000	1 lapora n	200.000.000	1 doku men	362.500.000	1 doku men		Biro Perekonomian		
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan					82%	3.544.400.748	83%	3.507.864.588	84%	2.722.197.247	84%	2.722.197.247	Biro Administrasi Pembangunan	Kalimantan Timur	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan					1 Doku men	309.679.300	1 Doku men	195.000.000	1 Doku men	213.000.000	1 Doku men	213.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	Kalimantan Timur	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0,00	0	1 Doku men	195.000.000	1 Doku men	213.000.000	1 Doku men	213.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	Kalimantan Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pembangunan						100%	199.410.000	100%	96.200.000	100%	124.204.200	100%	124.204.200	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan								33 stel	15.000.000	33 stel	15.000.000	33 stel	15.000.000	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								10 Lapo ran	69.600.000	10 Lapo ran	89.204.200	10 Lapo ran	89.204.200	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								12 Lapo ran	11.600.000	12 Lapo ran	20.000.000	12 Lapo ran	20.000.000	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum						3 Doku men	2.262.746.638	3 Doku men	1.086.664.223	3 Doku men	1.007.353.247	3 Doku men	1.007.353.247	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								12 Lapo ran	457.264.000	12 Lapo ran	194.334.867	12 Lapo ran	194.334.867	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							10 Paket	6.781.843	10 Paket	5.000.000	10 Paket	5.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	Kalimantan Timur	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							15 Laporan	622.618.380	15 Laporan	808.018.380	15 Laporan	808.018.380	Biro Administrasi Pembangunan	Kalimantan Timur	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan kantor (Biro Adbang)					85%	1.103.175.650	85%	1.121.052.320	85%	1.111.595.800	85%	1.111.595.800	Biro Administrasi Pembangunan	Kalimantan Timur	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							12 Laporan	23.000.000	12 Laporan	13.000.000	12 Laporan	13.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	Kalimantan Timur	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12 Laporan	37.795.800	12 Laporan	37.795.800	12 Laporan	37.795.800	Biro Administrasi Pembangunan	Kalimantan Timur	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12 Laporan	1.060.256.520	12 Laporan	1.060.800.000	12 Laporan	1.060.800.000	Biro Administrasi Pembangunan	Kalimantan Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)					85%	426.283.800	85%	201.354.000	85%	212.044.000	85%	212.044.000	Biro Administras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							1 unit	40.562.000	1 unit	40.562.000	1 unit	40.562.000	Biro Administras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya							3 Unit	121.482.000	3 Unit	121.482.000	3 Unit	121.482.000	Biro Administras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							20 Unit	39.310.000	30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000	Biro Administras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan					100%	1.174.888.844	100%	1.661.852.696	100%	1.174.888.844	100%	1.174.888.844	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	
				Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan					70%	2.741.407.304	75%	2.741.407.304	80%	2.741.407.304	80%	2.741.407.304	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					90%	1.823.106.400	90%	2.642.860.000	90%	1.390.000.000	90%	1.390.000.000	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD							12 Lapo ran	548.234.000	12 Lapo ran	510.000.000	12 Lapo ran	510.000.000	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN							12 Lapo ran	476.500.000	12 Lapo ran	400.000.000	12 Lapo ran	400.000.000	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah							6 Lapor an	2.718.629.000	6 Lapor an	1.831.407.304	6 Lapor an	1.831.407.304	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian Pembangunan					90%	730.189.950	90%	1.760.400.000	90%	750.000.000	90%	750.000.000	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan							4 doku men	366.200.000	4 doku men	350.000.000	4 doku men	350.000.000	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah							12 Lapor an	694.000.000	12 Lapor an	500.000.000	12 Lapor an	500.000.000	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah							1 Doku men	332.600.000	1 Doku men	324.888.844	1 Doku men	324.888.844	Biro Adminstras i Pembangu nan	Kalimantan Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Layanan Biro Pengadaan Barang & Jasa						82	3.066.485.154	83	3.034.875.412	84	3.302.107.708	84	3.302.107.708	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel						0	0	90,00	185.000.000	90	134.278.000	90	134.278.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0	0	12,00	185.000.000	90	134.278.000	90	134.278.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai						0	0	80,00	170.000.000		514.680.000		514.680.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan						0	0	0	0	1	31.500.000	1	31.500.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						0	0	10	150.000.000	20	420.000.000	20	420.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0	0	12	20.000.000	100	63.180.000	100	63.180.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum					0	0	90	823.850.000	90	566.460.500	90	566.460.500	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0	0	20	119.250.000	1	176.988.000	1	176.988.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					0	0	50	5.000.000	1	16.902.500	1	16.902.500	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0	0	40	699.600.000	20	372.570.000	20	372.570.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya pelayanan kantor					0	0	85	449.225.412	85	851.251.651	85	851.251.651	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0			449.225.412	20	851.251.651	20	851.251.651	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum					0	0	85	1.106.800.000	85	1.131.521.557	85	1.131.521.557	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0	0	1	10.000.000	4	5.250.000	4	5.250.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0	0	12	36.000.000	12	77.013.800	12	77.013.800	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan					0	0	12	1.060.800.000	12	1.049.257.757	12	1.049.257.757	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik					0	0	85	300.000.000	85	103.916.000	85	103.916.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						0	0	3	30.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						0	0	6	250.000.000	2	32.216.000	2	32.216.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						0	0	50	20.000.000	20	33.700.000	20	33.700.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)						Level 3	4.242.589.262	Level 3	5.049.000.000	PKP-PB Pro Aktif	4.255.000.000	PKP-PB Pro Aktif	4.255.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							0	1.912.089.750	88	1.750.000.000	90	1.347.256.600	90	1.347.256.600	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim
			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa						0	0		450.000.000	1	354.634.600	1	354.634.600	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa					0	0		800.000.000	2	607.830.000	2	607.830.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa					0	0		500.000.000	2	384.792.000	2	384.792.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik					95%	1.425.173.212	95	1.700.000.000	95	1.388.528.400	95	1.388.528.400	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik					0	0		800.000.000	2	700.040.400	2	700.040.400	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					0	0		500.000.000	2	330.300.000	2	330.300.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					0	0		400.000.000	3	358.188.000	3	358.188.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa					0	905.326.300	75	1.599.000.000	87,5	1.519.215.000	87,5	1.519.215.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa						0	0		665.000.000	200	421.440.000	200	421.440.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim
			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa						0	0		450.000.000	1	629.815.000	1	629.815.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim
			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa						0	0		484.000.000	1	467.960.000	1	467.960.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kaltim
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								80	181.000.000.000	81	171.628.865.521			Biro Umum	
			Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0	0	100	500.000.000			Biro Umum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							0	0	2 Dokumen	500.000.000			Biro Umum		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik							100	82.130.984.576	100	82.088.655.674			Biro Umum		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							14 Dokumen	80.246.010.726	700 Orang	80.457.301.674			Biro Umum		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							12 Dokumen	1.884.973.850	12 Dokumen	1.631.354.000			Biro Umum		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah							100	214.200.000	100	1.127.526.000			Biro Umum		
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							1 Laporan	214.200.000	1 Laporan	526.450.000			Biro Umum		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							0	0	12 Laporan	601.076.000			Biro Umum		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah							100	12.231.463.066	100	2.070.016.000			Biro Umum		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut							358 Stel	671.385.000	4 Paket	500.000.000			Biro Umum		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							1 Laporan	9.306.578.066	1 Dokumen	1.220.016.000			Biro Umum		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							3 Laporan	2.253.500.000	225 Orang	350.000.000			Biro Umum		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah							100	19.167.223.926	100	18.135.610.017			Biro Umum		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							15 jenis	358.652.541	7 Paket	350.000.000			Biro Umum		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							12 Laporan	375.656.560	12 Laporan	614.358.000			Biro Umum		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							10614 Porsi	1.747.495.000	50 Paket	2.500.000.000			Biro Umum		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							5 Jenis	664.831.775	14 Paket	693.200.000			Biro Umum		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							1500 orang/ perjalan an atau 1500 O/T	15.038.800.000	1000 Laporan	12.978.052.017			Biro Umum		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							1 Laporan per tahun	621.372.000	1 Dokumen	600.000.000			Biro Umum		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							3 Aplikasi	360.416.050	2 Dokumen	400.000.000			Biro Umum		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100	15.006.481.500	100	7.500.000.000			Biro Umum		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							25 Unit	11.908.890.000	19 Unit	5.000.000.000			Biro Umum		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							10 Jenis	3.097.591.500	150 Unit	2.500.000.000			Biro Umum		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100	23.561.853.000	100	20.973.865.521			Biro Umum		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							2100 lembar	110.000.000	12 Laporan	80.000.000			Biro Umum		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12 Laporan	12.564.000.000	12 Laporan	8.628.865.521			Biro Umum		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							0	0	2 Laporan	765.000.000			Biro Umum		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							13750 0 m2	10.887.853.000	12 Laporan	11.500.000.000			Biro Umum		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							100	9.299.194.000	100	14.046.773.521			Biro Umum		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya							150 Unit	6.632.410.000	150 Unit	5.095.777.400			Biro Umum		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							0	0	100 Unit	1.000.000.000			Biro Umum		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pemeliharaan/ Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banugnan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi							13 Unit	1.811.784.000	13 Unit	7.400.996.121			Biro Umum		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banungan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi							150 unit	855.000.000	150 unit	550.000.000			Biro Umum		
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik							100	8.256.408.851	100	11.186.418.788			Biro Umum		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							2 Laporan	8.256.408.851	2 Orang /Bulan	250.252.396			Biro Umum		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan								0	0	4 Paket	187.600.000			Biro Umum	
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								0	0	8 Orang	870.000.000			Biro Umum	
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH								0	0	12 Laporan	9.878.566.392			Biro Umum	
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								100	11.132.191.081	100	14.000.000.000			Biro Umum	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan								1 Laporan	3.395.046.200	90 Paket	4.500.000.000			Biro Umum	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan								1 Laporan	3.323.750.000	90 Paket	4.500.000.000			Biro Umum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan							1 Laporan	4.413.394.881	100 Paket	5.000.000.000			Biro Umum		
Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya koodinasi bidang kesejahteraan rakyat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan terhadap urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat							83%	2.431.487.264	84%	2.403.392.301	84%	2.403.392.301	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu							100%	89.362.000	100%	116.000.000	100%	116.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD							2 Dokumen	21.572.000	2 Dokumen	26.000.000	2 Dokumen	26.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD							2 Dokumen	23.820.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD							2 Dokumen	14.820.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja SKPD							2 Laporan	29.150.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	Biro Kesejahteraan Rakvat	Kalimantan Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan							90%	1.018.911.264	92%	335.000.000	92%	335.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Verifikasi Keuangan dan Daftar Honor Non PNS							12 Bulan	1.005.402.264	12 Bulan	320.000.000	12 Bulan	320.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan SKPD							1 Laporan	13.509.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu							100%	8.400.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek							4 Orang	8.400.000	4 Orang	30.000.000	4 Orang	30.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum							12 Bulan	1.179.924.000	12 Bulan	1.010.000.000	12 Bulan	1.010.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor							50 Jenis	491.514.000	50 Jenis	150.000.000	50 Jenis	150.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi							12 Laporan	629.410.000	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	800.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kaltim dan luar Kaltim	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan							100 Dokumen	59.000.000	100 Dokumen	60.000.000	100 Dokumen	60.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang							12 Bulan	31.376.000	12 Bulan	771.392.301	12 Bulan	771.392.301	Biro Kesejahteraan Rakyat		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat atau dokumen yang dikirim							1000 Surat	20.000.000	1000 Dokumen	20.000.000	1000 Dokumen	20.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Komunikasi							12 Bulan	11.376.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan									17 Laporan	736.392.301	17 Laporan	736.392.301	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik							90%	103.514.000	90%	141.000.000	90%	141.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							10 Unit	83.224.000	10 Unit	120.000.000	10 Unit	120.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan							20 Unit	20.290.000	20 Unit	21.000.000	20 Unit	21.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kalimantan Timur	
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti							85%	44.637.954.075	90%	40.741.067.412	90%	40.741.067.412	Biro Kesejahteraan Rakyat		
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti							85%	33.698.152.075	100%	33.941.067.412	100%	33.941.067.412	Biro Kesejahteraan Rakyat		
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Sarana dan Prasarana Spiritual							1 Laporan	29.286.301.075	12 Dokumen	25.941.067.412	12 Dokumen	25.941.067.412	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kaltim dan luar Kaltim	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Bina Mental Spiritual							1 Laporan	4.411.851.000	12 Dokumen	8.000.000.000	12 Dokumen	8.000.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kaltim dan luar Kaltim	
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti							85%	8.979.015.000	100%	3.600.000.000	100%	3.600.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat		
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan							1 Laporan	1.805.137.000	12 Dokumen	2.000.000.000	12 Dokumen	2.000.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kaltim dan luar Kaltim	
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan							1 Laporan	496.148.000	12 Dokumen	800.000.000	12 Dokumen	800.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kaltim dan luar Kaltim	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial								1 Laporan	6.677.730.000	12 Dokumen	800.000.000	12 Dokumen	800.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kaltim dan luar Kaltim
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti								85%	1.960.787.000	100%	3.200.000.000	100%	3.200.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata								3 Laporan	610.980.000	13 Dokumen	1.200.000.000	13 Dokumen	1.200.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kaltim dan luar Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja							3 Laporan	951.460.000	20 Dokumen	1.300.000.000	20 Dokumen	1.300.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kaltim dan luar Kaltim	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan							3 Laporan	398.347.000	12 Dokumen	700.000.000	12 Dokumen	700.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kaltim dan luar Kaltim	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja P-RPJMD. Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 5 (lima) dalam RPJMD Tahun 2019-2023 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP-nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	71.05			77	79	81	81
2	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	86			92	95	97	97
3	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	49			71	79	89	89
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	52.63			-	-	-	-

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. RENSTRA Setda Prov Kaltim merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilakukan karena adanya perubahan susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan RENSTRA sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya, P-RENSTRA ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai target.

